

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pengentasan kemiskinan merupakan masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia dan kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi kunci pemecahannya. Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata diseluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah.

Kecamatan Sumalata merupakan induk dari Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari 11 Desa dan memiliki penduduk dengan jumlah yang besar. Sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga pendapatan yang dihasilkan dibawah rata-rata standar, sehingga pada tahun 2007 pemerintah memberikan program pembangunan desa yang dioperasikan berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Data Kecamatan. 2007)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya dalam pembangunan

dari, oleh dan untuk masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan dana stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Kemendagri, 2008:16).

Dalam kurun waktu perjalanan PNPM ini, terjadi dinamika dan perkembangan yang sangat pesat, khususnya terkait penambahan lokasi dan alokasi program. Pelaksanaan PNPM telah mendorong terciptanya perangkat system sosial yang bersifat dinamis. Sistem sosial yang dibangun oleh PNPM memungkinkan warga desa memperoleh peningkatan kapasitas tidak hanya dalam bentuk kursus dan pelatihan, tetapi juga pembiasaan cara berfikir dan cara bertindak bagi warga desa ketika mereka menjalankan perannya masing-masing didalam pelaksanaan program.

Berdasarkan data diatas maka perlu disusun skema baru tahapan kegiatan PNPM yang makin mendekatkan mekanisme pembangunan partisipatif yang digunakan dalam program ini dengan skema perencanaan regular yang dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten maupun Kota. Dasar pemikirannya adalah apabila sistem perencanaan pembangunan yang dikelola Pemerintah Daerah dapat dijamin bersifat partisipatif, maka akan terjamin pula bahwa pengalaman masyarakat desa dalam merencanakan dan mengelola pembanguan secara partisipatif tetap dihargai dan diberi tempat utama dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Integrasi program merupakan strategi yang dipilih untuk menjadikan PNPM sebagai sarana revitalisasi sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten atau Kota. Hal ini bertujuan agar perencanaan tersebut bersifat partisipatif. Kegiatan PNPM merupakan sebuah penciptaan akselerasi waktu tahapan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dengan memanfaatkan proses dan hasil perencana program yang dikelola oleh masyarakat satu tahun sebelumnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat Perdesaan. Tujuan utama program ini adalah untuk

membantu mensejahterakan masyarakat di tingkat Perdesaan dengan memandirikan anggotanya.

Program PNPM juga menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau fokusnya pada kelembagaan lokal, pedampingan, pelatihan serta dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam pelaksanaan programnya seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Salah satu bagian dari program PNPM di masyarakat khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP). SPKP merupakan program pemberian modal kepada kaum perempuan melalui simpan pinjam sebagai modal usaha untuk menjamin kelangsungan hidup melalui usahanya tersebut. Sasaran program ini adalah perempuan miskin di pedesaan dalam memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan miskin pedesaan untuk disentuh dengan pinjaman lunak tanpa bunga dan agunan secara berkelompok dengan sistem tanggung bersama di karenakan mereka sangat sulit untuk dijangkau oleh lembaga keuangan perbankan, jaminannya hanyalah kejujuran dan kepercayaan (Kemendagri, 2008:20).

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sedangkan jenis kegiatan simpan pinjam tersebut yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, yakni memberikan tambahan dana modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Berdasarkan observasi awal bahwa keberadaan program SPKP di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara belum maksimal berperan dalam menangani permasalahan gender dalam memenuhi kebutuhannya secara ekonomi dan kesejahteraan lainnya. Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan kemampuan ekonomi warga

masyarakat itu sendiri khususnya perempuan. Program-program di Kecamatan Sumalatabelum berjalan secara optimal dari target yang dicapai khususnya menyangkut penyalahgunaan dana bantuan berupa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang hanya digunakan oleh anggotanya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga modal tersebut tidak berkembang dan tidak bisa digulirkan pada kelompok-kelompok lain yang masih membutuhkannya.

Selain itu, masalah yang sering timbul pada program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yakni tidak meratanya jangkauan pada kaum perempuan yang berhak menerima dana bantuan sebagai sasaran program, tidak adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai prosedur, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam mengoperasikan dana bantuan tersebut untuk menangani masalah ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya akan menimbulkan persepsi negatif dikalangan masyarakat khususnya perempuan sebagai sasaran program dan pengguna dana simpan pinjam tersebut.

Dalam mensukseskan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dibutuhkan peran kaum perempuan dalam memahami dan mengelola dana bantuan tersebut, sehingga dana yang digunakan dapat berkembang dan membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Namun, dari hasil pengamatan di lapangan khususnya peran kaum perempuan melalui Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) menunjukkan bahwa sebagian perempuan yang menerima bantuan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian yang sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan bila dikaitkan dengan persyaratan penerima dana bantuan. Tetapi karena pendekatan tertentu dengan para pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, mereka tetap memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha tersebut. Keadaan ini mengakibatkan dana yang telah dipinjamkan kepada mereka tidak secara optimal dapat dikembalikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian pada sisi lain akibatnya dana yang telah dipinjamkan tersebut tidak dapat bergulir untuk mengembangkan usaha warga

masyarakat yang lain, sehingga keadaan ini menimbulkan berbagai keluhan tentang ketidakadilan dari warga masyarakat.

Permasalahan lain sesuai hasil pengamatan peneliti bahwa ada sebagian kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan untuk mengembangkan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola dana yang telah diterima guna untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Kondisi ini mengakibatkan usaha yang mereka geluti sebagai sasaran pengembangan tidak mengalami kemajuan, kemudian pada akhirnya dana yang telah dipinjamkan tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Keadaan ini mengakibatkan dana Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) tidak dapat bergulir untuk warga masyarakat lain yang sangat memerlukan bantuan untuk pengembangan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara singkat peneliti dengan masyarakat, penerima bantuan SPKP bahwa faktor penyebab timbulnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan SPKP adalah sangat variatif, dan tergolong dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek yang berasal dari dalam diri masyarakat khususnya kaum perempuan seperti pengetahuan dan keterampilan individu, kondisi psikologis dan faktor eksternal meliputi aspek yang berasal dari luar diri anggota SPKP yang meliputi faktor ekonomi dan faktor sosiologis. Penyebab faktor ekonomis adalah sistem pengelolaan usaha yang tidak memberikan keuntungan, sehingga ketika dana SPKP tersebut dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati kondisi usaha tidak mengalami perkembangan. Penyebab faktor sosiologis yaitu sikap masyarakat terhadap program tersebut yang belum memberikan respon yang positif. Sikap masyarakat yang dimaksud adalah berkaitan dengan aspek pengetahuan, penerimaan dan kecenderungan bertindak terhadap pengelolaan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, bila tidak diperoleh solusinya, maka Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang dilaksanakan di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

tidak memberikan makna dan manfaat secara positif bagi pengembangan usaha warga masyarakat. Selain itu kondisi juga dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap warga masyarakat karena diakibatkan ketidakmampuan mengelola dana yang telah di pinjamkan kepada mereka. Konsekuensinya lain yang muncul adalah taraf kesejahteraan hidup masyarakat tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pembinaan khususnya bagi anggota SPKP berupa pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dana bantuan tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, anggota SPKP juga perlu dibekali dengan kemampuan memimpin atau memenej kelompok dengan baik. Sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kegiatan kelompok melalui proses pelatihan dan pembinaan lainnya, serta kerja sama dengan pihak terkait agar dapat memberikan suatu binaan yang berlanjut secara kontinue.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, mendorong peneliti untuk mengadakan suatu penelitian yang difokuskan pada masalah pembinaan dalam meningkatkan keberhasilan program SPKP, yang diformulasikan dengan judul: **Keberhasilan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Ditinjau Dari Intensitas Pembinaan (Penelitian Pada Program SPKP Se-Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah keberhasilan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan disebabkan oleh intensitas pembinaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan program Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ditinjau dari intensitas pembinaan.

1.4 Manfaat Penelitian

2. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah terutama pada lembaga PNPM bagi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Sumalata.
- b. Mengembangkan potensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya bagi pribadi peneliti maupun kalangan akademisi, dalam memberikan informasi kepada dunia pendidikan akan pentingnya meningkatkan keberhasilan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) melalui intensitas pembinaan.

3. Manfaat Praktis

- a. Memberikan layanan motivasi pada masyarakat pedesaan bagi pengembangan usaha Simpan Pinjam kelompok Perempuan di Kecamatan Suamalata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam mencapai keberhasilan program SPKP melalui intensitas pembinaan, serta berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya menyangkut program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).